

EDISI : Rabu, 11 September 2019

KLIPING BERITA MEDIA CETAK KABUPATEN BULELENG



PENYUSUN :
SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
SETDA KABUPATEN BULELENG

RESUME BERITA

EDISI : Rabu, 11 September 2019

NO	NAMA MEDIA	JUDUL BERITA	RESUME	KET.
1	FAJAR BALI	Mediasi Puri Buleleng vs Dishub Buleleng Deadlock	Dengan adanya hal tersebut pihak Puri Gede Buleleng melakukan penyevelan yang di lakukan di pintu masuk Dishub naik yang ada di sebelah timur pintu masuk dan sebelah barat pintu masuk menuju Puri Buleleng yang juga dimanfaatkan sebagai pintu masuk menuju Dinas Kebudayaan Buleleng. Namun sayang mediasi yang seharusnya yang mendapatkan solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut malah deadlock alias tidak menemukan penyelesaian.	
		16 September Pimpin Dewa Buleleng Dilantik	Surat Keputusan (SK) Gubernur Bali Wayan Koster Nomor 1960/01-A/HK/2019 tentang persminan pengangkatan pimpinan DPRD Kabupaten Buleleng Masa Jabatan 2019-2024 telah diterima seketariat dewan. Merunjuk pada SK tersebut, pelantikan pimpinan DPRD kabupaten Buleleng sementara Gede Supriatna saat dikonfirmasi, membenarkan soal pelantikan terebut. Setelah turunnya SK Gubernur Bali tertanggal 6 september 2019 lalu, maka dalam hal ini kami telah mencari hari baik dalam melakukan pelantikan para pimpinan dewan yang telah diusulkan dan telah disetujui berdasarkan SK Gubernur Bali Wayan Koster pada 16 september 2019 mendatang oleh ketua pengadilan negeri singaraja wayan sukanila SH,MH, katanya.	
		Buleleng Targetkan Masuk Kota klasifikasi II	Kota singaraja ditargetkan masuk menjadi kota klasifikasi II pada penilaian Adipura tahun 2020 mendatang. Target tersebut dianggap	

			<p>realistis mengingat saat ini di Kabupaten Buleleng sudah memenuhi beberapa persyaratan yang ditetapkan oleh kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (LHK), salah satunya Buleleng sudah memiliki Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) dalam menangani sampah.</p>	
		<p>Futsal Tuan Rumah Ditindas Buleleng</p>	<p>TIM Futsal Kabupaten Buleleng dalam Porprov Bali yang digelar di kabupaten Tabanan yang dilangsungkan di GOR Debes tabanan, Selasa (10/9) kemarin pagi dimana tim Kabupaten Buleleng berhasil menindas tim tuan rumah dalam pertandingan futsal dengan skor 10-3 (7-2). Dalam pertandingan tersebut dimana tim Buleleng sudah unggul sejak paro babak pertama.</p>	



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : Bali express

Kategori : Dewan

Pimpinan Dewan Buleleng Dilantik Pekan Depan

SINGARAJA, BALI EXPRESS - Pelantikan pimpinan DPRD Buleleng akan dilakukan 16 September mendatang. Kepastian ini menyusul turunnya surat keputusan Gubernur Bali Wayan Koster nomor 1960/01-A/HK/2019, perihal peresmian pengangkatan pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Buleleng masa jabatan tahun 2019-2024.

Ketua Dewan DPRD Kabupaten Buleleng Sementara Gede Supriatna menjelaskan SK Gubernur Bali diterima Sekretariat Dewan pada 6 September lalu. Atas turunnya SK tersebut, pihaknya memastikan jika pelantikan para pimpinan

Wakil Rakyat tersebut akan dilaksanakan pada pekan depan.

"Setelah menerima SK, kami langsung mencari hari baik. Nah akhirnya disepakati pelantikan pada 16 September 2019 mendatang. Nanti dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Wayan Sukanila," katanya.

Setelah dilantik, agenda akan dilanjutkan dengan pembentukan alat kelengkapan dewan DPRD Buleleng. Sehingga 45 wakil rakyat ini segera menggenjot beberapa program kerja serta pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pada masa persidangan ketiga yang telah

dirancang wakil rakyat sebelumnya.

Seperti diketahui, dari hasil rapat paripurna intern, pimpinan definitif DPRD Buleleng dan pimpinan fraksi untuk periode 2019-2024 akhirnya ditetapkan pada Rabu (4/9) lalu. Posisi pimpinan dewan diduduki oleh empat partai politik. Seperti PDIP, Golkar, Gerindra dan Nasdem.

Posisi Ketua DPRD Buleleng masih tetap diduduki oleh politisi PDIP, Gede Supriatna. Kemudian posisi Wakil Ketua I dari Partai Golkar masih dipercayakan kepada I Ketut Susila Umbara. Sedangkan posisi Wakil Ketua II dijabat oleh politisi Gerindra, Gede Suradnya dan Wakil Ketua III diduduki oleh

Ni Made Putri Nareni.

Sedangkan, jumlah fraksi yang dibentuk sebanyak 6 fraksi. Diantaranya Fraksi PDIP dipimpin oleh Ketut Ngurah Arya. Fraksi Golkar dipimpin Nyoman Gede Wandira Adi. Kemudian, Fraksi Gerindra dipimpin Ketut Mertiasa, Fraksi Nasdem dengan ketua Ketut Windrawati, Fraksi Hanura dengan ketua Ketut Wirsana, dan terakhir Fraksi Demokrat sepakat membentuk fraksi gabungan dengan Perindo dan dipimpin oleh Kadek Sumardilka. Sedangkan, PKE yang mendapat satu kursi di DPRD Buleleng bergabung ke fraksi PDIP. (dik/aim)

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL - SETDA KABUPATEN BULELENG



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : Bali express

Kategori : BKD

Nunggak Pajak Rp 509 Juta, Hotel Kinaara Ditempeli Stiker

SINGARAJA, BALI EXPRESS - Hotel Kinaara Resort yang terletak di Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Buleleng ditempeli stiker bertuliskan Objek Pajak Ini Belum Melunasi Kewajiban Perpajakan Daerah pada Selasa (10/9) kemarin. Penempelan stiker oleh Tim Penagihan Badan Keuangan Daerah (BKD) Buleleng dilakukan, lantaran manajemen hotel menunggak pajak hingga Rp 509 juta terhitung tahun 2018 lalu.

Data dari Badan Keuangan Daerah (BKD) Buleleng menyebutkan, besaran tunggakan pajak hotel tersebut mencuat setelah BKD melakukan audit pada Maret 2019 lalu. Tercatat manajemen hotel menunggak Rp 509 juta. Rinciannya tunggakan pokok hotel sebesar Rp 352.164.014 serta denda Rp 43.147.379, tunggakan pajak restoran Rp 96.339.737 serta denda Rp 11.921.723, tunggakan pajak air tanah Rp 5.507.900. "Sebenarnya hotel ini rajin bayar pajak. Namun yang dibayar tidak sesuai dengan banyaknya jumlah pengunjung yang datang," ujar Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan Pajak

I Gede Sasnita Ariawan kepada awak media.

Dia mencontohkan, pada Agustus 2018 lalu misalnya, pihak hotel seharusnya membayar pajak Rp 95 juta karena high season. Tapi yang dibayar ke Pemda hanya Rp 26 juta. "Sisanya kemana? Inilah akhirnya kami temukan adanya tunggakan sebesar Rp 509 juta," imbuhnya.

Lanjut Sasnita, sebelum melakukan pemasangan stiker, BKD Buleleng se-jatinya sudah berulang kali melakukan mediasi dengan pihak manajemen hotel, terhitung sejak 16 April 2019 lalu. Namun hasilnya, kata Sasnita, deadlock.

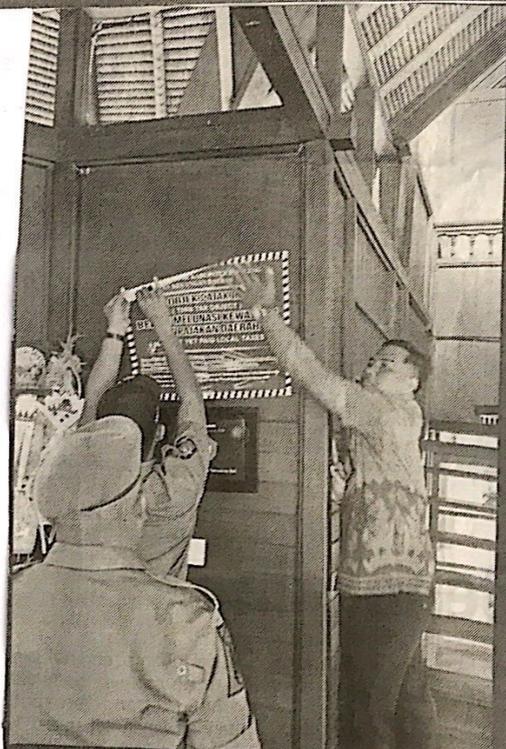
Bahkan, pada 3 Juli 2019, pihak BKD Buleleng memberikan surat peringatan (SP) I kepada pihak manajemen hotel Kinaara. "SP1 tetap tidak dibayar, sudah kami telepon juga tetap tidak dibayar. Kami coba kembali melakukan mediasi pada 19 Agustus kemarin, namun tidak ada hasilnya juga. Sampai kami berikan SP2 pada 10 September ini berupa pemasangan stiker," ungkapnya.

Puncaknya, pemasangan stiker pun terpaksa dilakukan. Langkah ini

didasari atas Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, dan turunan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017.

Pada Pasal 11 ayat (5) disebutkan, teguran ke dua dapat diikuti dengan penempelan stiker pada objek pajak yang bersangkutan. Bila dalam rentang waktu tujuh hari SP2 ini tidak digubris oleh pihak hotel, maka akan dikenakan sanksi berupa penyitaan, pemberhentian operasional, hingga pidana.

Ditambahkan Sasnita, pihak hotel mengklaim tunggakan pajak ini terjadi karena adanya masalah internal di bagian manajemen. Hanya saja, BKD Buleleng berharap, agar pihak hotel segera membayar tunggakan pajaknya, kendati dengan cara dicicil. "Pajak itu kan bukan uang dari pihak hotel. Yang bayar pajak itu kan masyarakat, yang memanfaatkan layanan di hotel itu, hanya saja dititipkan kepada pihak hotel. Sudah dipotong 10 persen oleh pihak hotel. Jadi tidak ada hubungannya dengan manajemen," pungkasnya. (dik/wid)



Sub Bagian Dok TEMPEL STIKER: Tim Penagihan Badan Keuangan Daerah (BKD) Buleleng saat menempel stiker terhadap Hotel Kinaara, lantaran menunggak pajak hingga Rp 509 juta.

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : *Bali express*

Kategori : *Mediasi*

Mediasi Deadlock, Parwata Kecewa

Terkait Pemblokiran Jalan di Areal Kantor Disbud

SINGARAJA, BALI EXPRESS - Panglinsir Puri Agung Buleleng Anak Agung Ngurah Parwata Panji tak kuasa menyembunyikan kekecewaannya. Pasalnya mediasi yang digelar dengan Dinas Kebudayaan Buleleng pada Selasa (10/9) siang *deadlock* alias tak membuahkan hasil. Terlebih, saat mediasi pihak Disbud hanya mengutus Sekertaris Dinas Kebudayaan, yang dinilainya tak menyelesaikan masalah. Mediasi yang berlangsung di Kantor Camat Buleleng dipimpin Camat Buleleng Gede Dody Sukma Oktiva Askara. Nampak pula perwakilan dari Bagian Hukum Setda Buleleng, Badan Keuangan Daerah, Kantor Pertanahan Singaraja, Kapolres Buleleng, Kodim 1609 Buleleng, Kelurahan Kendran, Kelurahan Paket Agung dan Kelurahan Liligundi.

Ditemui se usai mediasi, Anak Agung Ngurah Parwata Panji tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Pasalnya mediasi tidak dihadiri pucuk pimpinan dari Dinas Kebudayaan Buleleng dan Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Buleleng. Kedua instansi ini justru diwakili para sekretarisnya, yang dinilai tidak mampu menyelesaikan masalah.

"Semuanya diwakili, bagaimana mau memberikan keputusan. Saya maunya kan ketemu langsung dengan pucuk-pucuk pimpinannya. Tolong dong respons *tiang* dari pihak puri. Secara skala memang Buleleng ini dipimpin Bupati. Namun secara niskala Buleleng ini masih punya kami," ucap Parwata dengan nada kesal.

Meski dalam mediasi itu pihak Disbud Buleleng berjanji tidak akan memarkirkan kendaraan di sekitar akses jalan antara Museum Buleleng dengan Museum Lontar Gedong Kirtya. Hanya saja Parawata menegaskan, akan tetap menutup jalan tersebut, sampai dirinya bisa bertemu dengan Kadisbud Buleleng Gede Komang, Kepala BKD Gede Sugiarta Widiada, dan Asisten Tata Pemerintahan Setda Buleleng Putu Karuna.

"Harus ada kesepakatan tertulis. Tidak ada perwakilan. Saya ingin bertemu dengan pemucuk pimpinan Kadisbud, BKD dan Asisten I, dan minimal ada tanda tangan dari Bupati, agar jalan itu bisa digunakan secara bersama. Jangan

kami dari pihak puri terus saja kalah. Dulu saya terus memohon agar tidak ada parkir di jalan itu tapi tetap saja ada parkir. *Kanggawang be malu*, satu-satu," imbuhnya.

Sekretaris Disbud Buleleng I Made Sudiarba menyebut, Disbud sudah berkomitmen per Selasa ini tidak lagi menggunakan akses jalan itu sebagai tempat parkir. Terkait kehendak pihak puri yang ingin bertemu langsung dengan Kepala Disbud Buleleng, BKD dan Asisten I, akan dipenuhi pada Jumat (13/9) mendatang. "Ya bisa disebut kalau mediasi hari ini *deadlock*. Namun setelah rembuk

ini harapannya secepatnya agar segera dibuka penutupan akses jalan itu," jelasnya.

Terpisah, terkait adanya dua sertifikat atas lahan tersebut, yakni milik puri dengan sertifikat hak milik nomor 39 yang terbit sejak 2002, dengan sertifikat hak pakai nomor 00004 tahun 2009 milik Dinas Kebudayaan Buleleng, Kepala BPN Buleleng, Made Sudarma enggan berkomentar banyak. Pihaknya mengaku harus melakukan pencarian data dan arsip terlebih dahulu. "Mohon maaf ya. BPN itu memberikani statement itu harus pakai data. Paling tidak saya harus panggil staf-staf saya

dulu. Harus dimaklumi, saya tidak bisa langsung bicara," singkatnya.

Diberitakan sebelumnya, salah satu panglinsir keluarga Puri Agung Buleleng memblokir akses jalan antara Museum Buleleng dengan Museum Lontar Gedong Kirtya yang berada di areal Dinas Kebudayaan Buleleng. Akibatnya, para pegawai Disbud kesulitan melintasi blockade jalan yang menggunakan bambu serta spanduk. Mereka terpaksa harus merunduk saat hendak melintas.

Spanduk berukuran 1x 2 meter berwarna merah ini membentang menutupi akses jalan yang kerap

digunakan pegawai Disbud menuju areal Sasana Budaya. Dalam spanduk itu juga bertuliskan "Tanah Hak Milik Dr. A.A Gede Djlantik, Sp.Rad, M.Sc, SHM Nomor 39 tahun 2002". Ada dua spanduk yang berukuran sama dipasang di areal tersebut.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, akses jalan tersebut ditutup Anak Agung Ngurah Parwata Panji sejak Minggu (8/9) kemarin. Bahkan hingga Senin (9/9) kondisinya masih tertutup. Kendati mengganggu akses pegawai yang bekerja, namun spanduk tersebut masih dibiarkan membentang. (dik/wid)

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL - SETDA KABUPATEN BULELENG



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media :

Kategori : *Samburagan*

MEDIASI: Suasana mediasi yang melibatkan Panglinsir Puri Agung Buleleng dengan Disbud, terkait pemblokiran akses jalan di areal Kantor Disbud Buleleng, Selasa (10/9) kemarin.



I PUTU MARDIKA BALI EXPRESS

BAG



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : Bali express

Kategori : TPA

Singaraja Andalkan TPA Bengkala

Bidik Kota Klasifikasi II dalam Penilaian Adipura

SINGARAJA-Kota Singaraja ditargetkan masuk menjadi kota Klasifikasi II pada penilaian Adipura tahun 2020 mendatang. Target tersebut dianggap realistis mengingat saat ini di Kabupaten Buleleng sudah memenuhi beberapa persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), salah satunya Buleleng sudah memiliki Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) dalam menangani sampah.

Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi persiapan penilaian Adipura tahun 2020 yang digelar oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Buleleng, di Ruang Rapat Unit IV Kantor Bupati Buleleng, Selasa (10/9).

Seusa memimpin rapat, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Buleleng Ni Made Rousmini mengungkapkan, saat ini Pemkab Buleleng sudah memiliki Jakstrada tentang pengelolaan dan pertanganan sampah. Selain Jakstrada yang tertuang dalam bentuk Peraturan Daerah tersebut, Pemkab Buleleng sendiri juga harus berupaya lebih keras lagi dalam pengolahan sampah. Karena, lanjut Rousmini, dalam penilaian Adipura nanti, pengolahan sampah baik oleh masyarakat maupun oleh Pemkab akan memperoleh poin tinggi.

"Jadi dari sisi RTH kami persiapkan, sisi kebersihan kota juga kami siapkan. Nah, kuncinya di Buleleng saat ini adalah TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang perlu kita benahi, perlu kita maksimalkan," kata Rousmini.

Saat ini masih ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemkab Buleleng dalam menangani masalah sampah. TPA Bengkala sendiri,

menurut Rousmini, masih terkesan sebagai *open dumping*. Dimana, TPA tersebut hanya menjadi tempat pembuangan sampah, tanpa adanya upaya pemilihan dan pengelolaan lebih lanjut.

Sedangkan untuk di kawasan Kota Singaraja sendiri sebenarnya sudah ada upaya pemilihan sampah di tingkat rumah tangga. Namun pemilahan yang dilakukan di hulu itu terkadang menjadi mubazir, karena ketika sampah sampai di TPA kembali bercampur antara sampah organik dengan anorganik.

"Semoga nanti Buleleng bisa memanfaatkan teknologi untuk mengelola sampah, sehingga nantinya bisa mengubah sampah menjadi benda yang bernilai ekonomis," harapnya. Sementara itu Kepala Bidang Petaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Buleleng, Nyoman Suarjana mengatakan, saat ini Kota Singaraja sangat siap untuk mengikuti penilaian Adipura tahun

2020 mendatang. Hal itu didasarkan pada pengalaman penilaian tahun 2016 lalu.

Meskipun demikian, pada penilaian Adipura nanti ada perbedaan pola penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian LHK. Dijelaskan Suarjana, salah satu indikator penilaian nantinya adalah data neraca sampah yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten. Dalam neraca tersebut, target pengurangan sampah sampai dengan tahun 2025 sebesar 30 persen. Sedangkan sampah yang dikelola oleh Pemkab mencapai 70 persen.

Pihaknya pun sangat optimistis Kota Singaraja masuk kategori Kota Klasifikasi II pada penilaian mendatang. Karena saat ini, tambah Suarjana, TPA Bengkala sudah menuju *Controlled Landfill*. Hal ini juga menjadi salah satu syarat untuk bisa masuk menjadi kota Klasifikasi II.

Masih dijelaskan Suarjana, pada TPA Control Landfill, dibuat sejumlah lubang untuk selanjutnya

pada lubang tersebut dimasukan sampah organik. Kemudian, pada lubang-lubang tersebut diurug dengan tanah setiap 5-7 hari. "Tapi kendala sekarang sampahnya masih heterogen. Karena keterbatasan sumber daya yang kami miliki, ada keterlembatan memilah sampah yang masuk ke TPA," jelasnya.

Untuk diketahui, pada penilaian Adipura mulai tahun 2020 akan diterapkan sistem penilaian berbasis data dan kondisi riil. Data dimaksud berupa neraca sampah yang dibuat oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Jakstrada. Sedangkan kondisi riil dimaksud adalah verifikasi lapangan yang dilakukan tim penilai.

Adapun untuk memperoleh kategori kota dengan Kalsifikasi II harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain kapasitas pengelolaan sampahnya mencapai 70 persen atau lebih, Operasional TPA sudah *Controlled Landfill*, serta Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota mencapai 10 persen atau lebih. (dik)

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL - SETDA KABUPATEN BULELENG